

Analisis Framing Pemberitaan Kebijakan Pemerintah Terkait Ketenagakerjaan sebagai Dampak Covid 19 di Kompas.com dan Malaysiakini

Merry Fridha Tri Palupi, Rahmat Edi Irawan

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya
Universitas Bina Nusantara Jakarta, Jl. H. syahdan No 9 Palmerah Jakbar

merry_rafi@yahoo.co.id

Abstract

In the beginning of 2020 the mass media coverage was adorned with information about covid-19 outbreaks. The spread of covid-19 has crossed continents and even the rest of the world, making this period called as pandemic because it has infected 4.9 million people. The magnitude of this incident made the media including Kompas.com and Malaysiakini.com continue to convey information not only about health issues, but also other impacts in various fields such as law, politics, security and other social issues such as the economy and employment. This online news portal from Indonesia and Malaysia always reports on the development of covid-19 outbreaks in their respective countries. So much news was uploaded by the two online media that researcher only chose one news related to labor policy as the impact of covid-19 outbreaks. Using the theory of reality construction from Peter L. Berger, researcher analyzed the news framing using Robert N Enmant's model. The results showed an imbalance between the two online news portals because it only represented one party, where Kompas.com fetched news about wages from the point of view of the business world while Malaysiakini framed the appeal for the suspension of Eid Al-fitr leave that delivered by Mufti P Pinang as an opinion leader who respected by the Malaysian society.

Keywords: *Framing Analysis, Policy, Labor, Pandemic, Online Media.*

Abstrak

Memasuki awal tahun 2020 pemberitaan media massa dihiasi dengan informasi mengenai wabah covid 19. Meluasnya persebaran covid 19 telah melintasi berbagai benua bahkan hingga berbagai penjuru dunia sehingga membuat masa ini disebut sebagai pandemi karena telah menginfeksi 4,9 juta jiwa. Besarnya kejadian ini membuat media termasuk Kompas.com dan Malaysiakini.com terus meneruskan menyampaikan informasi tidak hanya seputar masalah kesehatan saja, namun juga dampak lainnya ke berbagai bidang seperti hukum, politik, keamanan serta masalah-masalah sosial lain seperti ekonomi dan ketenagakerjaan. Portal berita online dari Indonesia dan Malaysia ini selalu memberitakan perkembangan covid 19 dinegaranya. Begitu banyaknya berita yang diunggah oleh kedua media online tersebut sehingga peneliti hanya memilih satu berita terkait kebijakan ketenagakerjaan sebagai dampak covid 19. Dengan menggunakan teori konstruksi realitas dari Peter L berger, peneliti menganalisis framing berita menggunakan model dari Robert N Enmant. Hasil Penelitian menunjukkan adanya ketidak berimbangan narasumber dari kedua portal berita online tersebut karena hanya mewakili satu pihak saja, dimana Kompas.com memframing berita tentang pengupahan dari sudut pandang dunia usaha sedangkan Malaysiakini memframing himbauan penangguhan cuti lebaran yang disampaikan oleh Mufti P Pinang sebagai *opinion leader* yang dihormati masyarakat Malaysia.

Kata Kunci: *Analisis Framing, Kebijakan, Tenagakerja, Pandemi, Media Online.*

PENDAHULUAN

Awal tahun 2020 berita-berita di media massa dihiasi dengan pemberitaan mengenai wabah penyakit corona atau yang biasa disebut covid 19 dengan penyebabnya yaitu virus SARS-CoV-2. Kasus pertama corona atau covid 19 terdeteksi pada desember 2019. Gejala yang dialami pasien *suspect* kala itu yaitu mirip dengan pneumonia. Kasus ini disinyalir berasal dari pasar hewan di Wuhan, Propinsi Hubei, China. Tingginya kasus kematian akibat terinfeksi virus SARS-CoV-2 ini rata-rata disebabkan oleh faktor umur dimana semakin tinggi tingkat usia maka semakin beresiko pada kematian, karena adanya faktor penyakit bawaan seperti riwayat hipertensi, gula darah yang tinggi serta fungsi ginjal menurun, dan riwayat sesak sehingga memperparah keadaan pasien sehingga dapat berujung pada kematian.

Interaksi yang luas antar manusia dari berbagai daerah maupun lintas negara membuat persebaran covid 19 ini demikian masif menyebar keseluruh dunia dan memakan begitu banyak korban. Data yang dirilis Pikiranrakyat.com pada Mei 2020 wabah covid 19 telah menjangar hingga ke 213 negara dan telah menginfeksi 4,9 juta jiwa (Pikiranrakyat.com diunduh 20 Mei 2020). Persebaran covid 19 yang melintasi berbagai penjuru dunia disebut sebagai pandemi. Begitu banyaknya korban dimasa pandemi ini. Beberapa Negara seperti Italia, Spanyol, dan Inggris telah berhasil melewati masa puncaknya dan kasus baru pun telah melandai. Namun ada beberapa Negara yang justru sedang dimasa puncak. Kekhawatiran yang muncul akibat banyaknya korban covid 19 ini menjadi momok yang menakutkan.

Daya infeksi virus SARS-CoV-2 yang sangat tinggi membuat virus ini demikian ditakuti. Hingga kini belum ditemukan antivirus yang dapat mengobati Covid 19 ini. Klaim-klaim obat penyembuh nyatanya belum dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Dan yang bisa dilakukan sementara ini adalah mencegah agar penularan virus ini tidak menyebar secara masif seperti misalnya menghindari kerumunan dengan menjaga jarak, menjaga kebersihan serta memakai masker dan *faceshield* ditempat-tempat umum.

Penyebaran virus SARS-CoV-2, merupakan ujian bagi masyarakat di seluruh dunia, termasuk masyarakat Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan data Worldometers, secara global pasien positif corona yang telah meninggal dunia berjumlah 160.896 (Pikiranrakyat.com diunduh 28 april 2020). Perhatian yang luar biasa karena wabah ini, menghinggapi masyarakat dunia. Banyak sekali informasi berkembang di berbagai media, baik informasi yang valid maupun yang hoax. Kepanikan masyarakat karena semakin banyaknya korban jiwa akibat virus ini, terus menghiasi pemberitaan media massa mainstream dan media baru. Perang informasi dengan tema Covid 19, menjadi daya tarik khalayak sehingga media menyuguhkannya dari berbagai sisi.

Pemberitaan mengenai covid 19, tidak hanya seputar masalah kesehatan, namun juga dampak lain pandemi ini ke berbagai bidang lainnya seperti hukum, politik, keamanan serta masalah-masalah sosial lain seperti ekonomi dan ketenagakerjaan. Dalam bidang ketenagakerjaan, perselisihan antara tenaga kerja dan industri, serta upaya pemerintah dalam menghadapi masalah PHK kerap menghiasi pemberitaan media selama masa pandemi. Hal ini tentu sangat meresahkan karena bidang ketenagakerjaan memiliki pengaruh yang kuat dalam mendorong pembangunan yang kuat dalam perekonomian sebuah daerah (Bado, 2016).

Dampak panjang akibat pandemi covid 19 membuat pemerintah Indonesia dan Malaysia harus membuat kebijakan khusus, seperti *lockdown* yang diambil oleh pemerintah Malaysia, dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diambil oleh pemerintah Indonesia yang pelaksanaannya telah diatur sedemikian rupa dan dilaksanakan sampai batas waktu tertentu. Pro-kontra terhadap kebijakan tersebut tentu berdatangan, namun tidak ada yang bisa dilakukan selain menekan laju persebaran agar virus ini tidak semakin meluas.

Pelaksanaan *lockdown* maupun PSBB diambil dengan pertimbangan menahan laju persebaran virus ini bukanlah tanpa resiko. Pemberlakuan kebijakan pemerintah dua negara ini tentu merupakan keputusan yang sulit. Banyak dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut seperti sendi-sendi

perekonomian yang menjadi terjepit. Riu rendahnya pemberitaan mengenai ketenagakerjaan akibat dampak wabah covid 19 sehingga pemberitaan mengenai hal ini begitu santer dan menjadi salah satu isu yang banyak menyita perhatian publik.

Berbagai langkah diambil pemerintah dan industri ditengah wabah corona terkait dengan ketenagakerjaan seperti diberlakukannya *Work From Home* (WFH) atau bekerja dari rumah serta penangguhan masa cuti. Namun dampak dari persebaran covid 19 yang demikian panjang membuat banyak perusahaan tidak sanggup bertahan sehingga akhirnya memberlakukan pemotongan upah, melakukan langkah efisiensi serta melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara masal dengan alasan *force majeure* (keadaan memaksa).

Di Indonesia beberapa daerah yang melakukan PSBB telah merumuskan hanya ada 11 sektor yang boleh beroperasi diantaranya adalah bidang kesehatan, bahan pangan (makanan dan minuman), bidang energi, bidang komunikasi dan teknologi informasi, bidang perhotelan, bidang konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar/objek vital dan bidang usaha yang menangani kebutuhan sehari-hari. Sementara bidang-bidang usaha selain 11 bidang tersebut tidak boleh beroperasi. Dengan kebijakan tersebut maka peta dunia usaha dan ketenagakerjaan menjadi masalah besar. Tingginya angka PHK karena bidang usahanya tidak boleh beroperasi selama PSBB dan daya beli masyarakat yang menurun membuat dunia usaha menjadi lesu dan menambah pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah.

Sengkuratnya bidang ketenagakerjaan membuat berbagai pihak mendorong segera diterbitkannya kebijakan terkait ketenagakerjaan. Dilihat dari berbagai konstruksi pemberitaan yang ada, sebagian media memihak ke pemerintah dengan cenderung mendukung langkah-langkah yang diambil, sementara sebagian lainnya justru selalu mengkritik dan menyalahkan berbagai langkah yang diambil oleh pemerintah setempat. Sangat sulit melihat bagaimana netralitas media ketika menyampaikan berita, karena sebagai intitusi bisnis media memiliki ideologi dan kepentingannya sendiri. Melihat hal tersebut perlu adanya penghindaran pemberitaan

subyektif walau dalam pelaksanaannya sangat sulit untuk dilakukan (Poentarie, 2015)

Masing-masing media membingkai berita sesuai dengan agendanya. Hal ini sangat membahayakan karena bila informasi hanya dikuasai oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan, hal ini akan berdampak pada penggiringan opini. Pernyataan ini sejalan dengan Azahar Kasim dan Adibah Ismail yang disampaikan dalam *Malaysian Journal Of Communication* bahwa analisis framing akan mengakibatkan pergeseran pemahaman pembaca terhadap berita karena persepsi masyarakat dapat diubah setelah mengonsumsi berita dari sebuah media (Kasim et al., 2018).

Penggiringan opini yang disebabkan informasi yang disampaikan media telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Rieka Mustika yang meneliti Analisis framing pemberitaan media online mengenai kasus pedofilia di akun facebook. Dalam penelitiannya, Rieka melihat terdapat perbedaan pembingkai dalam berita yang disuguhkan oleh kompas.com dan Replubika online dimana replubika online lebih sering memilih narasumber yang memiliki pemikiran Islam dikerenakan ideologi dari replubika yang tentu sangat berbeda dengan kompas.com (Mustika, 2017).

Pembingkai berita oleh media juga di analisis Fong&Chia dan telah diterbitkan di Sage Journal. Pada penelitiannya, Fong&Chia menganalisis isi pemberitaan mengenai hubungan diplomatik Malaysia dan China. Dalam penelitian yang berjudul *Framing Diplomatic Relations: A Comparative Analysis of Malaysian and Chinese Newspaper Coverage on Premier Li Keqiang's Visit to Malaysia*, Peneliti menganalisis bahwa koran Malaysia dan Cina kebanyakan menggunakan valensi netral dalam melaporkan tentang diplomasi Malaysia-Cina. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan mengenai kunjungan Perdana Menteri Li ke Malaysia dimana bingkai yang dibangun oleh surat kabar ke dua Negara tersebut terlihat netral sehingga persepsi masyarakat kedua Negara menjadi lebih positif terhadap hubungan bilateral kedua Negara tersebut (Fong & Chia, 2017).

Pembingkai berita atau framing merupakan sebuah pendekatan untuk melihat

bagaimana realitas dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Dalam proses konstruksi yang dilakukan, media akan melakukan seleksi, pengulangan dan penekanan pada aspek tertentu yang menjadi perhatian media. Berbagai kepentingan berlomba untuk saling mempengaruhi agar menjadi isu yang layak diangkat media. Untuk itu media harus memegang etika pemberitaan, seperti: akurat, lengkap, adil dan berimbang serta baru (Habibie, 2018).

Melihat latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti berita-berita yang berkembang mengenai kebijakan pemerintah khususnya terkait ketenagakerjaan, sebab sejatinya permasalahan ketenagakerjaan harus dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat, dan potensi sebuah Negara karena merupakan masalah krusial yang tidak boleh dipandang sebelah mata (Saleh, 2016). Untuk itu peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut: "Bagaimana analisis framing pemberitaan kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan sebagai dampak covid 19 di Kompas.com dan Malaysiakini". Dan dari rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini bertujuan: "Untuk mengetahui bagaimana analisis framing pemberitaan kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan sebagai dampak covid 19 di Kompas.com dan Malaysiakini".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana peneliti menggunakan model analisis framing dari Robert N Entmant. Penelitian kualitatif memiliki anggapan bahwa manusia dapat menangkap

:

berbagai realitas dan fenomena yang terjadi disekitarnya (Mulyadi, 2013). Sedangkan framing merupakan pembingkai media dalam menyajikan berita. Eriyanto dalam Anggoro mengatakan bahwa analisis framing dapat digambarkan sebagai sebuah analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas (aktor, peristiwa atau kelompok apa saja) dibingkai oleh media. Pembingkai tersebut dikonstruksi media dan di rekonstruksi oleh masyarakat (Anggoro, 2016).

Analisis framing merupakan penelitian yang berfokus untuk meneliti dokumen dimana peneliti akan menganalisis sebuah teks dan bahasa dalam sebuah unit analisis yang telah ditentukan. Analisis framing digunakan untuk membedah ideologi media saat mengkonstruksi sebuah fakta. Analisis framing masuk kedalam paradigma konstruktivisme yang merupakan kritik terhadap paradigma positivisme dimana paradigma ini memiliki pandangan bahwa sebuah teks berita yang dihasilkan sebuah media merupakan sebuah konstruksi yang sengaja dibentuk oleh media (Sadono, 2015).

Dalam proses menganalisis, peneliti mencermati strategi dari sebuah media bagaimana sebuah berita diseleksi atau ditonjolkan, bagaimana wartawan menyeleksi isu, sehingga berita menjadi lebih menarik dan membawa dampak dapat menggiring opini khalayak kedalam berita yang disampaikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis framing dari Robert N Entman yang merujuk pada pemberian definisi, penjelasan dan evaluasi serta rekomendasi dalam suatu peristiwa yang diwacanakan (Santosa, 2016). Berikut konsep analisis framing dari Robert N. Entmant

Tabel 1
Konsep Analisis Framing Robert N Entmant

Pendefinisian masalah	Bagaimana sebuah isu menjadi menarik untuk diangkat? Apa yang menjadi masalah inti?
Memperkirakan masalah atau sumber masalah	Siapa yang menjadi aktor dalam permasalahan? Apa penyebab dari suatu masalah?
Membuat keputusan	Nilai moral apa yang digunakan untuk melegitimasi sebuah masalah?
Menekankan Penyelesaian	Solusi apa yang ditawarkan dalam menyelesaikan sebuah masalah?

Sumber: (Anggoro, 2016).

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan unit analisis yaitu pemberitaan mengenai covid 19 terkait ketenagakerjaan dari media online Kompas.com dan Malaysiakini medio 14 April 2020. Unit analisis adalah satuan paling kecil dari objek penelitian yang diklasifikasikan menjadi sebuah data yang akan di analisis oleh peneliti (Muliadi et al., 2018). Jadi dapat dikatakan bahwa unit analisis merupakan sumber informasi akan sebuah data yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini, Peneliti akan menganalisis judul, gambar, headline, tubuh serta penutup berita. Alasan peneliti hanya menganalisis framing berita mengenai covid 19 yang hanya berkaitan dengan ketenagakerjaan sebab pemberitaan mengenai ketenakerjaan adalah salah satu isu yang sensitif serta banyak menyita perhatian publik. Selanjutnya Peneliti melakukan dokumentasi data pada kedua portal berita online tersebut, kemudian data diolah kedalam bentuk unit-unit tertentu sesuai dengan model analisis framing dari Robert N Entman.

Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruksi realitas dari Peter Berger dan Thomas Luckman. Dalam buku *The social Of Construction of Reality*, Berger dan Lucman menyatakan bahwa pemaknaan terhadap sebuah realitas muncul akibat adanya komunikasi (Berger & Lucman, 1996). Inti teori ini menyatakan bahwa manusia akan merasionalisasi pengalaman yang dimilikinya dan memaknainya kembali dalam bahasa yang dipakai sebagai alat berkomunikasi.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrument penelitian yang mengatur jalannya penelitian serta menetapkan fokus penelitian, batasan penelitian, dan menginterpretasi data serta memberikan simpulan terhadap penelitian sehingga dalam penelitian kualitatif penelitian bersifat intersubjektif.

Teori konstruksi realitas memiliki tiga proses tahapan yaitu eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi. Pada tahap eksternalisasi seseorang akan menyesuaikan diri baik secara fisik maupun mental. Pada tahap ini seseorang akan menyesuaikan diri dengan dunia sosio-kultural yang merupakan produk dari manusia itu sendiri. Proses selanjutnya yaitu objektivikasi pada tahap ini seseorang telah dapat

mengekspresikan dirinya kedalam hubungan sosial masyarakat. Dalam tahap objektivikasi, seseorang mulai berinteraksi dalam dunia yang intersubjektif. Dan pada tahap internalisasi seseorang akan mengalami kesadaran sehingga subyektifitasnya dipengaruhi oleh konstruksi sosial disekitarnya. Ketiga tahapan proses tersebut akan selalu ada pada diri seseorang sampai pada akhirnya ia memahami sebuah realitas yang dikonstruksinya (Pratiwi, 2018). Sejatinnya pekerjaan seorang jurnalis adalah mengkonstruksikan sebuah realitas dimana realitas tersebut sejalan dengan ideologi si wartawan dan juga ideologi media tempat wartawan tersebut bekerja (Sadono & Fensi, 2015). Konstruksi realitas yang diusung tersebut dari tidak dapat dihindari sebab dari awal proses pemilihan berita, sudah ada keberpihakan dalam memilih *angle* berita, seperti misalnya siapa yang akan menjadi narasumber dan pada proses selanjutnya tentu ideologi yang diusung akan mendominasi hasil pemberitaan. Konstruksi realitas sesuai dengan ideologi yang diusung memang tidak dapat dihindari. Namun sebagai pilar ke 4 demokrasi nilai-nilai profesional seorang wartawan harus tetap dijunjung tinggi, karena media memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mendidik masyarakat serta memiliki peran sebagai agen perubahan sosial. Untuk itu seorang wartawan harus memiliki sensitifitas dalam menulis berita apa yang akan dia sajikan sehingga menimialisir bias dan kepentingan pribadi karena salah satu hal yang harus dipegang teguh oleh seorang jurnalis adalah kebebasan dalam menyampaikan berita dan tidak ada tunggangan kepentingan dari pihak manapun. (Winarni & Lestari, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Besarnya dampak covid 19 terhadap kehidupan masyarakat membuat media berusaha untuk masuk kesemua lini untuk mengupas tuntas apapun tentang corona. Mulai dari pemberitaan mengenai WHO yang berjuang habis-habisan namun belum menemukan titik terang obat yang dapat menyembuhkan penyakit ini, sampai dengan berhembusnya kabar bahwa virus SARS-CoV-2 ini merupakan konspirasi

Negara-negara besar yaitu Amerika, Rusia dan China sehingga dihubungkan dengan teori konspirasi. Di banyak tempat di dunia, termasuk di Indonesia, epidemi Virus Covid 19 ini juga membuat banyak profesi dan bidang pekerjaan yang terdampak dan mengalami perubahan dimana pertemuan-pertemuan tatap muka diganti dengan pertemuan online melalui dunia maya. Akibatnya, banyak kegiatan bisnis yang harus dihentikan atau ditutup sementara. Singkatnya, selain berdampak langsung pada bidang kesehatan masyarakat, dampak di bidang lainnya di berbagai bidang kehidupan masyarakat lainnya, juga ikut terpengaruh. Tidak heran, jika media juga ikut menampilkan pemberitaan lain mengenai dampak di berbagai bidang lainnya dari berbagai sisi. Semua pemberitaan tersebut demikian menarik dan menjadi perhatian publik, termasuk pemberitaan yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan sebagai dampak covid-19 yang juga tidak kalah menyita perhatian.

Pemberitaan mengenai ketenagakerjaan yang terdampak dengan adanya pandemi menjadi poin penting karena ekonomi makro hampir semua Negara mengarah pada pertumbuhan negatif sehingga PHK besar-besaran tidak dapat dihindari. Ironisnya, pengajuan PHK itu bukan saja dilakukan perusahaan kecil atau menengah saja, tetapi juga merayap ke korporasi besar, seperti Garuda Indonesia, KFC Indonesia, Traveloka dan lainnya. Hal tersebut jelas menunjukkan, bahwa persoalan pandemi Covid 19 ini memang sulit. Termasuk bagi pemerintah yang selalu menimbulkan dilema, apakah harus menyelamatkan kesehatan atau kehidupan terlebih dahulu atau sebaliknya mendahulukan penyelamatan perekonomian. Sebuah keputusan yang pasti menjadi keputusan berat, namun harus cepat diambil langkah penyelesaiannya.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis bagaimana framing pemberitaan terkait ketenagakerjaan sebagai dampak covid 19 di kompas.com dan www.malaysiakini.com. Pemilihan ke dua media online tersebut sebab menurut hasil penelusuran peneliti, ke dua media

online tersebut adalah media online terbesar dinegaranya. Kompas.com merupakan salah satu pionir media online di Indonesia yang dimiliki oleh sebuah korporasi besar PT.Kompas Gramedia Group (KKG) yaitu sebuah kelompok usaha yang bergerak di bidang media massa. Sebagai sebuah perusahaan media terbesar di Indonesia, kehadiran KKG tidak bisa dilepaskan dari sosok Jakob Oetama sebagai pendirinya. Saat ini PT KKG memiliki beberapa anak perusahaan dari bisnis yang sangat bervariasi seperti media cetak, media online, radio, hotel, lembaga pendidikan, stasiun televisi, event organizer dan lain sebagainya. Meski Kompas.com bukan media online terbesar, namun karena dimiliki oleh korporasi media terbesar di Indonesia, namun kehadirannya tetap diperhitungkan. Kompas.com bersama dengan harian Kompas dan media massa milik KKG lainnya, dianggap sebagai salah media yang independen, netral dan dapat dipercaya. Media-media massa milik KKG sering dijadikan referensi pemberitaan di Indonesia.

Kompas.com di dirikan sejak 1995. Media online yang telah berusia 23 tahun ini mendapatkan penghargaan sebagai media online terpercaya sejak 2018 hingga 2020 yang artinya penghargaan ini di dapat dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut oleh superbrands. Dengan pengakuan dari pihak ketiga maka peneliti memilih kompas.com dengan pertimbangan selain merupakan media online terbesar di Indonesia, kompas.com juga tidak terkait dengan partai politik dan non partisan sehingga peneliti melihat bahwa kompas.com merupakan salah satu media yang netral dalam memberikan informasi kepada khalayaknya.

Sejalan dengan kompas.com, di Malaysia terdapat sebuah portal media online terbesar yaitu Malaysiakini. Situs berita online ini timbul karena sebuah kebutuhan untuk melaporkan pemecatan dan penangkapan wakil perdana menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 1998. Maka berdasarkan pada kepentingan tersebut didirikanlah sebuah koran bawah tanah ini (malaysiakini.com diunduh 20 Mei 2020). Dengan banyaknya perhatian terhadap situs berita online ini, maka malaysiakini.com diluncurkan secara resmi pada November 1999. Dengan menyediakan berita dalam versi tiga bahasa (Melayu, Inggris dan

China) media online ini mengkalim memiliki kebijakan editorial yang secara konsisten mendukung keadilan sosial, hak asasi manusia, kebebasan mengeluarkan pendapat, demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Melihat sejarah pendirian malaysiakini dapat dilihat bahwa media online ini merupakan media sayap kiri dan independen. Malaysiakini memiliki motto news and views that's matter yang artinya adalah berita dan penglihatan adalah materi. Sebagai media independen malaysiakini sangat berani dalam mengkritik kebijakan pemerintah Malaysia yang tidak sesuai. Dengan keberaniannya media ini kerap mendapat pujian sebagai media yang kritis. Sebagai Negara dengan berdasarkan pada sistem kerajaan dan parlementer, membuat kebijakan dalam pemerintahan Negara ini menjadi

terpusat. Namun dengan kebijakan pemerintah dan kerajaan Malaysia yang tidak mensensor konten media di Internet membuat malaysiakini tetap bisa berdiri hingga hari ini.

Dengan pertimbangan seperti diatas, maka peneliti memutuskan kedua media online tersebut sebagai subyek penelitian. Melalui penelusuran penulis dalam waktu satu hari, kompas.com mengeluarkan artikel mengenai covid 19 sejumlah 419, sedangkan Malaysiakini mengeluarkan 83 berita mengenai covid 19. Dengan jumlah berita yang sangat banyak maka peneliti memutuskan untuk mengambil satu berita tentang covid 19 yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Berikut Analisis framing pemberitaan yang dimulai dari kompas.com

Gambar 1



Sumber: Kompas.com

Pada gambar 1 diatas terlihat bahwa ilustrasi gambar pada berita tersebut adalah tiga orang buruh perempuan yang memakai masker putih, baju seragam putih dan penutup kepala putih. Tidak jelas bidang kerja apa ketiga buruh tersebut bekerja. Pada Gambar tersebut dapat didefinisikan bahwa buruh perempuan merupakan salah satu penopang perekonomian

baik dalam skala besar maupun skala domestik. Dari gambar tersebut peneliti menginterpretasi bahwa penggunaan gambar buruh perempuan sebab terdapat serotype bahwa perempuan adalah kaum yang lemah. Penggunaan gambar perempuan dapat diinterpretasikan bahwa dalam keadaan sulit, perempuan adalah makhluk yang pertama terdampak dan ketika terjadi krisis

keuangan pada perusahaan, perempuan adalah menjadi pihak yang paling dirugikan.
pihak yang pertama dirumahkan dan tentu

Tabel 2
Analisis Framing Berita Mengenai Isu Ketenagakerjaan di Kompas.com
Medio 14 April 2020

Judul	Define Problem	Intepretasi
<p>Judul berita yang penulis angkat untuk dianalisis berjudul: Pengupahan Pegawai yang Dirumahkan Tergantung Kesepakatan Perusahaan dan Pekerja.</p>	<p>Pandemi covid-19 menimbulkan banyak permasalahan di berbagai sektor kehidupan terutama di bidang ketenagakerjaan .</p>	<p>Judul yang terdapat pada tulisan merupakan potongan statement dari Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Bekasi dalam wawancara yang terdapat pada tubuh berita. Statement panjang dari Suhup sang kepala dinas dipotong sebagian untuk dijadikan judul. Bila membaca judul ini publik akan digiring pada sebuah narasi bahwa pekerja tidak memiliki pilihan selain menerima penawaran untuk menyepakati keputusan yang telah ditetapkan perusahaan.</p>
<p>headline Berita: Pemkab Bekasi sementara menutup perusahaan baik yang ada didalam maupun diluar kawasan industri selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung. Akibatnya, banyak karyawan yang bekerja diperusahaan tersebut dirumahkan tanpa digaji.</p>	<p>Diagnose Problem Pada headline berita diceritakan bahwa pemkab Bekasi yang menutup sementara segala kegiatan diperusahaan-perusahaan yang berada di kawasan industri Bekasi karena mengikuti kebijakan pemerintah akan adanya PSBB.</p>	<p>Intepretasi Pada headline yang diusung dalam berita ini peneliti mengintepretasikan akan adanya upaya untuk menggiring opini akan ketidakberdayaan buruh, hal ini terlihat dari kalimat: Akibatnya banyak karyawan yang bekerja diperusahaan tersebut dirumahkan tanpa di gaji. Pada kalimat tersebut digambarkan bahwa buruh merupakan kaum yang tidak berdaya. Kata akibatnya merupakan sebuah pola kalimat yang didasarkan pada prinsip sebab akibat.</p>
<p>Tubuh Berita Pada tubuh berita terdapat wawancara dengan Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yang mengatakan bahwa: “Seluruh dunia pasti menetapkan force majeure jadi masing-masing</p>	<p>Make Moral Judgment Kalimat yang ditegaskan oleh Ketua Serikat Pekerja Metal Indonesia sebagai narasumber adalah tentang kebijakan yang berbeda antar perusahaan tentang pengupahan. Dan hal ini</p>	<p>Intepretasi Dari penggalan wawancara diatas, peneliti mengintepretasi bahwa masalah kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan saat ini akibat persebaran covid 19 merupakan</p>

perusahaan kebijakannya berbeda-beda, ada yang dibayar sekian persen ada yang tidak digaji”.	dianggap wajar karena terjadi disemua Negara karena adanya sebuah peristiwa besar yang tidak terduga	force majeure, sehingga semua perusahaan merasakan hal tersebut. Sehingga bukan sebuah kesalahan apabila perusahaan hanya menggaji sekedarnya.
Berita Penutup Pada penutup berita lebih lanjut Soeparno sebagai Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia mengatakan: “Ya sekarang kan sudah ada kartu prakerja, ya daftarlah, setidaknya tidak membebani”.	Treatment Recommendation Kalimat paling bawah memberi penekanan akan perusahaan yang terbebani bila harus membayar karyawan dalam kondisi sulit seperti ini sehingga urusan ini dilimpahkan kepada pemerintah pusat.	Intepretasi Melalui hasil kutipan wawancara pada penutup berita, terlihat jelas bahwa media memframing posisi buruh yang merupakan beban perusahaan dikala situasi sulit seperti sekarang ini sehingga Sebagai Ketua Serika Pekerja Metal Indoneisia Soeparno, melimpahkan urusan buruh kepada pemerintah dengan menyerahkan agar buruh mendaftarkan kartu prakerja yang digagas pemerintah pusat.

Sumber: Diolah peneliti.

Dari berita di kompas.com mengenai covid 19 terkait ketenagakerjaan diatas menggambarkan bahwa kondisi susahnya perusahaan saat ini adalah akibat persebaran virus corona yang tidak terduga dan berlarut-larut, sehingga membuat kondisi ekonomi semakin sulit. Dan dampak kesulitan ekonomi perusahaan memberi permakluman bila banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya atau hanya memberi upah sekedarnya. Kondisi tersebut terpaksa dilakukan perusahaan, karena kesulitan keuangan, untuk menggaji dan memberikan upah secara penuh terhadap karyawannya. Minimnya pemasukan, bahkan sebagian ada yang tidak beroperasi sama sekali sehingga tidak ada pemasukan, membuat langkah mengurangi upah hingga merumahkan karyawan, menjadi pilihan yang banyak diambil perusahaan di Indonesia. Sementara, langkah

PHK belum dilakukan, sebab perusahaan-perusahaan tersebut juga tidak memiliki dana untuk memberikan pesangon yang layak dan standar sesuai dengan aturan UU yang berlaku.

Dalam artikel berita tersebut terdapat opini mengenai pengupahan yang pemberiannya tergantung kesepakatan antara pemilik dan pekerja. Disini media memframing opini bahwa seolah-olah kedua belah pihak (Pemilik dan buruh) telah bersepakat mengenai upah. Namun pada kenyataannya buruh hanya menerima keputusan yang diberikan perusahaan. Artinya posisi buruh yang lemah membuat buruh tidak memiliki daya tawar. Dengan berpijak pada alasan *force majeure* (keadaan mendesak) perusahaan angkat tangan dan menyerahkan permasalahan kepada pemerintah dengan meminta buruh untuk mendaftar pada program kartu prakerja.

Pemberitaan Kompas.com memang lebih mengarah pada adanya faktor *force majeure* yang harus diterima semua pihak akibat dari pandemi Covid 19 ini. Media *online* ini melihat bahwa, semua faktor dan semua kalangan tidak bisa menghindari terkena dari melesunya kegiatan perekonomian karena sebagian warga masyarakat harus berdiam diri di rumah, dan meminimalkan aktifitas di luar rumah, termasuk kegiatan bisnis. Sebagai akibatnya, maka semua pihak harus mau menerima kenyataan adanya kesulitan yang harus mereka hadapi dalam kehidupan. Termasuk adanya PHK, yang tidak bisa dihindari pengusaha dan harus diterima oleh buruh sebagai orang yang terkena PHK. Bahkan, jika ada hak-hak buruh yang tidak sesuai dengan UU, seolah dengan kondisi *force major* tadi, semua pihak, termasuk butuh bisa menerimanya. Jadi, meski banyak dirugikan, namun framing media seperti yang dilakukan Kompas.com justru tidak terlalu berpihak kepada kaum buruh tersebut. Mereka malah diminta menerima

kondisi yang memang tidak bisa dihindari oleh semua pihak ini.

Pemilihan kedua narasumber yang semuanya berpihak pada pengusaha semakin melemahkan posisi buruh. Hal ini tentu tidak tepat dilakukan oleh media terpercaya sekelas Kompas, dimana Kompas selama ini dipercaya sebagai media yang netral. Ketidakberimbangan pemilihan narasumber membuat pemberitaan tergiring pada sebuah opini tertentu, untuk menerima informasi bahwa masalah kompensasi terhadap pegawai yang dirumahkan merupakan opsi yang dipilih untuk menyelamatkan perusahaan, sementara nasib buruh sebagai pihak yang lemah tidak memiliki daya tawar sehingga yang bisa dilakukan hanya menerima keputusan perusahaan saja.

Setelah menganalisis berita dikompas.com, peneliti akan menganalisis pemberitaan mengenai kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan sebagai dampak covid 19 yang dirilis oleh www.malaysiakini.com yang peneliti sampaikan pada tabel berikut ini:

Gambar 2



Sumber: Malaysiakini.com

Pada gambar 2 diatas terlihat foto Wan Salim Wan Mohd Noor yang merupakan Mufti Pulau Pinang. Mufti Pulau Pinang merupakan sebuah lembaga formal dan resmi yang terafiliasi oleh kerajaan Malaysia yang memiliki hak untuk mengeluarkan fatwa-fatwa terkait ke Islaman. Seperti misalnya menentukan awal ramadhan, awal 1 syawal, fatwa halal-haram dan lain sebagainya. Seorang pejabat Mufti P Pinang sangat dihormati di Malaysia karena pejabat ini merupakan ulama besar yang setiap fatwa dan perkataannya harus di ikuti oleh umat.

Sebagai Negara yang berlandaskan Islam maka Malaysia menganut falsafah

“*Samina Wa’atho’na*” yang artinya taatlah kepada pimpinan mu. Mufti P Pinang merupakan Ulil amri bagi masyarakat Malaysia. Dimana kedudukannya dianggap sebagai pemimpin yang harus ditaati, sejauh apa yang disampaikan tidak zahir dan sesuai dengan ajaran Islam (Bay, 2011). Hal ini yang membuat kedudukan Mufti menjadi penting dan sentral dalam kebijakan tidak hanya yang berhubungan dengan masalah ke Islaman saja tapi juga masalah-masalah yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan.

Tabel 3
Analisis Framing Berita Mengenai Isu Ketenagakerjaan di Malaysiakini
Medio 14 April 2020

<p>Judul Mufti P Pinang Tiada Masalah Tangguh Cuti Umum Aidil Fitri</p>	<p>Define Problem Ilustrasi gambar pada berita adalah foto Mufti P Pinang yang merupakan ketua lembaga resmi dibawah kerajaan yang bertugas memberikan fatwa terkait persoalan keislaman. Dibawah foto, terdapat judul Mufti P Pinang: Tiada Masalah Tangguh Cuti Aidil Fitri.</p>	<p>Intepretasi Pada berita ini, pemerintah Malaysia memberikan himbauan akan penangguhan cuti lebaran dengan menggandeng Mufti P Pinang sebagai opinion leader. Himbauan penangguhan cuti dengan menggandeng Mufti P Pinang sebab sebagai negara dengan berdasarkan pada hukum Islam, masyarakat Malaysia sangat menghormati dan menuruti himbauan dari Mufti P Pinang sebagai ketua lembaga yang memberikan fatwa masalah-masalah keislaman.</p>
<p>Headline Berita Headline berita dibuka dengan kalimat: Tiada masalah sekiranya kerajaan menangguhkan cuti sempena sambutan aidil fitri bagi melindungi orang awam dari wabak covid 19 seperti yang</p>	<p>Diagnose Problem Pada headline terlihat bahwa, Dr. Wan Salim Mohd Noor selaku ketua Mufti P Pinang, mengatakan bahwa kerajaan akan menangguhkan cuti lebaran untuk melindungi masyarakat</p>	<p>Intepretasi Kalimat, tiada masalah merupakan lawan kata dari ada masalah. Yang dapat di intepretasikan bahwa tidak ada masalah bila cuti ditangguhkan. Dan kebalikannya ada masalah</p>

dilaksanakan Indonesia, kata Dr. Wan Salim Mohd Noor.	dari pesebaran covid 19, dimana kebijakan ini seperti kebijakan pemerintah Indonesia.	bila lebaran pekerja diberi cuti. Karena akan memungkinkan di waktu libur lebaran memicu orang untuk bepergian dan menambah persebaran virus corona.
Tubuh berita Dalam tubuh berita terdapat petikan wawancara oleh Mufti P Pinang, sebagai berikut: “Balik kampung beramai-ramai boleh memburukkan lagi penyebaran wabak covid 19, memandatangani penjarakan sosial akan gagal diamalkan apabila mereka yang pulang beraya berkumpul dihentian serta kawasan rehat dan rawat sepanjang lebu raya”.	Make moral recommendation Dalam penyampaiannya Mufti P Pinang menyampaikan bahwa tradisi pulang kampung yang biasa dilakukan warga Malaysia saat hari raya akan memperburuk keadaan. Social distancing akan gagal dilakukan bila pemudik berkumpul di tempat peristirahatan disepanjang jalan.	Intepretasi Pada kalimat ini Mufti P Pinang menyampaikan kekhawatirannya akan dampak pulang kampung di hari raya akan membuat pemudik berkumpul ditempat-tempat peristirahatan.
Penutup berita Dalam penutup berita terdapat petikan wawancara dengan Dr. Wan Salim Mohd Noor, sebagai berikut:”Ikut arahan pihak berkuasa kerana dalam Islam perintah pihak kerajaan wajib dipatuhi oleh rakyat dalam perkara-perakara yang baik dan ada kepentingan awam”.	Treatment Recommendation Himbauan untuk tetap dirumah, disampaikan oleh Mufti P Pinang dengan penegasan bahwa rakyat harus mengikuti perintah dari pihak yang berkuasa, dengan penegasan hal ini sesuai ajaran agama Islam.	Intepretasi Dalam menyampaikan kebijakan untuk tetap dirumah, pemerintah Malaysia melibatkan <i>opinion leader</i> dari unsur pemuka agama yaitu mufti P Pinang. Mufti P Pinang mengutip ajaran islam dimana masyarakat harus patuh kepada pimpinannya.

Sumber: di olah peneliti

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti dengan menggunakan model Robert Ent Enmant, tentang pemberitaan mengenai kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan sebagai dampak covid-19 di malaysiakini terlihat bahwa malaysiakini memilih Mufti P Pinang sebagai narasumber tunggal, untuk menyampaikan himbauan dari pemerintah terkait penanguhan cuti lebaran. Tidak ada narasumber lain dalam berita ini dapat diartikan pesan untuk berhari raya dirumah akan lebih diikuti oleh masyarakat melalui *opinion leader*. *Opinion leader* merupakan seorang pemimpin opini yang pendapatnya menjadi rujukan masyarakat. Artinya, cara penyampaian pesan yang dilakukan media *online* di Malaysia ini melalui dua tahap. Media menggunakan orang yang bisa mempengaruhi masyarakat di sekitarnya, untuk menyampaikan pesan. *Two step flow* dalam komunikasi ini dianggap lebih

efektif untuk menyampaikan pesan yang dianggap penting dan perlu ketaatan penerima pesan dalam menjalankan isi pesan.

Tidak dapat disangkal bahwa peran *opinion leader* sangat mempengaruhi masyarakat pada sistem pemerintahan monarki seperti Malaysia. Peran *opinion leader* seringkali digunakan oleh pemerintah terkait sosialisasi kebijakan. Peran *opinion leader* dapat menjadi kunci apakah sebuah kebijakan dapat diterima masyarakat atau tidak. Pada berita tersebut, media memframing bahwa tidak ada permasalahan bila cuti hari raya ditanggihkan sebab kekhawatiran bila libur lebaran diberlakukan, masyarakat Malaysia akan mudik atau pulang kampung dan berkumpul yang artinya akan beresiko pada kenaikan persebaran covid 19. Meski sudah memframing dengan isu agar masyarakat tidak kemana-mana dsaat berhari raya, namun media online di Malaysia

ini coba menghindari untuk beropini atau menyampaikan pesan secara langsung kepada masyarakat.

Himbauan yang disampaikan Mufti P Pinang sebagai penyambung lidah pemerintah, lebih karena keberadannya sebagai *opinion leader* yang dihormati oleh masyarakat Malaysia dianggap lebih efektif sebab fatwa-fatwa Mufti menjadi pedoman dalam kehidupan sosial dan beragama masyarakat Malaysia. Permasalahan penangguhan cuti yang sejatinya merupakan kebijakan kolaboratif dari perusahaan (industri) dan pemerintah, dimasa pandemi ini *opinion leader* pun turut dihadirkan. Pilihan *opinion leader* seorang ulama, juga merupakan pilihan yang cerdas, karena profil demografi penduduk negeri jiran, sebagai penganut Islam yang taat, maka mereka pasti akan lebih mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemuka agama mereka. Apalagi, isi pesan yang disampaikan adalah sesuatu yang masih terkait dengan penyelenggaraan atau ritual agama, sehingga seorang Mufthi, yang dianggap sebagai orang yang dihormati dalam sistem keagamaan Islam di Malaysia, menjadi *opinion leader* yang dipilih media online Malaysia kini, untuk menyampaikan sebuah pesan.

Sebagai Negara yang menganut hukum Islam, kehadiran pemuka agama sebagai *opinion leader* dapat dijadikan sebagai rujukan informasi. pemecahan masalah, dan dapat menggiring opini yang dikehendaki. Hal ini terjadi karena Mufti P Pinang selalu menjadi rujukan media Malaysia. Dalam hal ini maka Mufti P pinang selain sebagai penyebar informasi dakwah juga sebagai pusat informasi yang dapat merubah sebuah tatanan masyarakat dan perilaku umat. Peran ganda inilah yang membuat pemerintah menggandeng Mufti P Pinang sebagai corong pemerintah dalam menginformasikan kebijakan terkait penangguhan cuti.

Dari analisis yang dilakukan peneliti pada kedua berita diatas, terlihat bahwa kedua media online terbesar Indonesia dan Malaysia tersebut, memperlihatkan strategi yang berbeda dalam pemilihan narasumber. Kompas.com sebagai media yang dikenal Nasionalis, memilih narasumber dari sisi pemerintah daerah dan ketua serikat pekerja yang berpihak kepada

pengusaha untuk menggiring opini akan kesusahan perusahaan akibat dampak covid 19 sehingga upah kepada pekerja akan diberikan sesuai kesanggupan perusahaan. Hal ini agak ironis karena sebenarnya di didirikannya serikat pekerja adalah agar lembaga ini dapat melindungi pekerja tentang upah dan kondisi kerja dari pihak pengusaha agar kedudukan pekerja dapat diperlakukan dengan seadil-adilnya (Ibrahim, 2017). Jadi bila keputusan berpihak pada pengusaha tentu hal ini tidak adil bagi buruh. Sedangkan malaysiakini lebih memilih *opinion leader* sebagai narasumber tunggal untuk menyampaikan himbauan terkait penangguhan cuti.

Pilihan strategi yang berbeda dari kedua media online di Indonesia dan Malaysia tersebut menunjukkan adanya keberpihakan yang dilakukan media, yang salah satunya disebabkan kepemilikan dari media massa tersebut. Sebagai media yang dimiliki oleh korporasi media besar, Kompas.com tidak bisa menghindari perspektif pengusaha dalam model pemberitaannya. Meski masih menunjukkan empati yang terjadi pada kaum buruh, mereka masih memperlihatkan bahwa pengusaha juga adalah korban yang perlu diselamatkan dalam masa resesi akibat pandemi Covid 19 ini. Sementara media *online* di Malaysia, justru melakukan framing dengan menggunakan seseorang atau sekelompok orang yang mendapat tempat di masyarakat. Pilihan ini menunjukkan bahwa mereka mengambil penekanan dari kelompok orang yang masih dianggap mewakili kepentingan masyarakat banyak.

Kedua berita dari media online tersebut memperlihatkan bagaimana media mengkonstruksi realitas dan menggiring opini bahwa yang disampaikan adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Padahal sejatinya realitas sosial merupakan buatan manusia dan ditafsirkan lagi oleh manusia. Jadi, konstruksi manusia akan sangat dipengaruhi oleh media yang dikonsumsinya. Sedangkan media sangat sulit untuk menyajikan berita sesuai dengan realitas obyektif (Karman, 2015). Sebuah pemberitaan pasti tidak akan bisa lepas dari agenda setting yang sudah ditetapkan dan disusun oleh pemilik dan pengelola media di level atas, sehingga apapun yang disajikan media tentu adalah sebuah konstruksi yang

dibangun oleh pemilik atau pengelola media tersebut. Artinya, tampilan media termasuk isinya adalah suatu konstruktif yang pasti akan disesuaikan dengan apa yang diinginkan atau menjadi goals dari pemilik dan pengelola media tersebut.

Pemilihan narasumber dan pembedaan berita yang dilakukan kedua media online tersebut bukan merupakan representasi dari realitas, namun merupakan pilihan wartawan, pengelola maupun pemilik media, dimana fakta, narasumber, dan peristiwa yang dinarasikan merupakan sebuah realitas yang dikonstruksi. Isi pemberitaan bukanlah suatu barang netral tanpa tujuan atau tanpa maksud ketika dihadirkan di ruang publik. Selalu ada kepentingan media, terhadap isi atau pemberitaan media. Kepentingan ekonomi atau kepentingan politik pemilik dan pengelola media, selalu menjadi kekuatan yang mengatur bagaimana isi media harus ditampilkan, bagaimana realitas harus dikonstruksi atau bagaimana sebuah framing harus dilakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis peneliti, kompas.com memframing berita mengenai dampak penyebaran virus corona yang meluas sehingga pemerintah daerah bekasi membuat kebijakan memberlakukan PSBB. Langkah yang diambil tersebut mengakibatkan industri yang berada daerah bekasi terpaksa harus menutup usahanya. Hal ini mengakibatkan masalah pengupahan pekerja menjadi masalah yang sangat penting. Dari berita diatas peneliti melihat bahwa kompas.com memframing masalah kesepakatan terkait pengupahan haruslah dimaklumi oleh berbagai pihak karena keadaan yang memaksa (*force majeure*) dimasa pandemi ini. Sedangkan malaysiakini mengunggah berita mengenai kebijakan untuk penangguhan cuti lebaran yang disampaikan oleh Mufti P Pinang dengan framing himbuan jangan mudik ini diserahkan pada sosok opinion leader yang dihormati masyarakat Malaysia.

Setelah melakukan analisis terhadap framing berita diatas, maka peneliti menganalisis adanya ketidak berimbangan narasumber yang hanya mewakili satu pihak

saja. Dimana kompas.com memilih narasumber yang hanya mewakili pengusaha, sedangkan malaysiakini memilih narasumber dari Mufti P Pinang yang merupakan *opinion leader* masyarakat Malaysia. Melihat ketidak berimbangan dalam pemilihan narasumber tersebut, maka peneliti memberikan saran kepada kedua media online untuk menambah narasumber pada berita agar berita lebih berimbang dan tidak memihak kepada salah satu sisi saja. Keberimbangan dalam pemilihan narasumber sangatlah penting sebab sebagai institusi sosial, media memiliki peran untuk merubah sikap masyarakat melalui informasi-informasi yang disampaikan sehingga pemberitaan berimbang adalah sebuah keharusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, A. D. (2016). Media, Politik dan Kekuasaan (Analisis Framing Model Robert N. Entman tentang pemberitaan hasil pemilihan Presiden, 9 Juli 2014 di TV One dan Metro TV). *ARISTO*, 2(2), 25–52. <https://doi.org/10.24269/ars.v2i2.16>
- Bado, B. (2016). Analisis Belanja Modal, Investasi, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Econosains*, 14(2), 34–42.
- Bay, K. (2011). Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur ' an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim. *Jurnal Ushuluddin*, XVII, 115–129.
- Berger, T., & Lucman, P. (1996). *The social Of Construction of Reality: A Treatise Inn The Sosiology Of Knowledge*. United State. Anchor Books.
- Fong, Y. L., & Chia, T. Y. (2017). Framing Diplomatic Relations: A Comparative Analysis of Malaysian and Chinese Newspaper Coverage on Premier Li Keqiang's Visit to Malaysia <sup/>. *China Report*, 53(4), 467–489. <https://doi.org/10.1177/0009445517727925>
- Habibie, D. K. (2018). Dwi Fungsi Media Massa. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 79. <https://doi.org/10.14710/interaksi.7.2.79-86>

- Ibrahim, Z. (2017). Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Upaya Mensejahterakan Pekerja. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 150–161.
<https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0076.150-161>
- Karman. (2015). *Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoritis Terhadap Konstruksi Realitas Peter L Berger)*.: Vol. Vol 5 No. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika.
- Kasim, A., Ismail, A., & Wahab, S. A. (2018). Framing Strategic News from The Perspective of Media Organizations in Malaysia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 34(1).
- Muliadi, H., Syam, H., & Anisah, N. (2018). *Analisis Semiotik, Nilai Moral, Roland Barthes, Pam Schiller dan Tamera Bryant*. 3.
- Mulyadi, M. (2013). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 15(1), 128.
<https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>
- Mustika, R. (2017). Analisis Pemberitaan Media Online Mengenai Kasus Pedofilia di Akun Facebook. *Jurnal Penelitian Komunikasi Vol.20. No 2, 20(20)*.
- Poentarie, E. (2015). *Komparasi Kebenaran, Relevansi, Keseimbangan Dan Netralitas Dalam Pemberitaan*. 19(1), 13.
- Pratiwi, A. (2018). Konstruksi Realitas Dan Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan LGBT Di Republika Dan BBC News Model Robert N. Entman). *THAQAFIYYAT: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam*, 19(1), 50–71.
- Sadono, T. P. (2015). Bingkai Berita Media Indonesia Tentang Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (Analisis Framing Pada Pemberitaan Media Indonesia). *Jurnal Bricolage. Vol 1 No 2*.
- Sadono, T. P., & Fensi, F. (2015). Pemberitaan Bergabungnya Hary Tanoesoedibjo Ke Partai Hanura (Analisis Ekonomi Politik Media Dalam Framing Portal Online Okezone.com dan Metrotvnews.com). *Jurnal Bricolage.*, 01(01), 1–28.
- Saleh, C. (2016). Kajian Kebijakan dan Strategi Pemerintah dalam Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Bisma*, 10(2), 216–239.
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA/article/view/6194>
- Santosa, R. (2016). Analisis Framing Pemberitaan Etnis Tionghoa dalam media online Republika di bulan Februari 2016. *Jurnal E-Komunikasi*, 4(1).
- Winarni, N., & Lestari, R. D. (2019). Netizen News Sources in the Journalistic Ethics Perspective (Case Study in Online Media Jogja.tribunnews.com). *Journal Pekommas*, 4(1), 85.
<https://doi.org/10.30818/jpkm.2019.2040109>

Sumber Internet:

- <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/14/23283011/pengupahan-pegawai-yang-dirumahkan-tergantung-kesepakatan-perusahaan>
<https://www.malaysiakini.com/news/520531>
<https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-01379224/update-virus-corona-di-dunia-sabtu-9-mei-2020-pasien-covid-19-tembus-4-juta-orang>